

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Rezim Orde Baru

Mendekati era globalisasi yang merujuk pada zaman masa kini, semakin banyak sekali yang harus dipahami akan peran partai Golkar, walaupun banyak sekali masa lalu Golkar yang tidak patut di contoh. Tahun 1967 pada pemerintahan Soeharto memutuskan untuk melaksanakan pemilihan umum untuk melegitimasi rezim. Saat itu Soeharto sangat bingung akan siapa yang menjadi rekannya di pemilihan umum. Pada waktu tersebut terjadi perdebatan mengenai kerjasama dengan Parmusi atau PNI atau keduanya.¹

Pada masa kepemimpinan orde baru, para pereformasi melakukan perdebatan dalam mendiskusikan sistem dua partai atau dua golongan. Pada akhirnya, adalah Soeharto yang memutuskan untuk menggunakan Golkar dalam pemilihan umum dan melakukan politik secara radikal menjadi sistem dua partai dan dua golongan. Soeharto bermaksud memenangkan pemilihan umum dan merestrukturisasi sistem perpolitikannya menggunakan Golkar.²

Setelah kemenangan Golkar terdapat banyak anggota yang lahir di Sekber Golkar, namun kepemimpinan partai Golkar saat itu tidak efisien

¹ David Reeve. *GOLKAR: Sejarah Yang Hilang. Akar Pemikiran dan Dinamika*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm. xxii.

² Ibid., hlm. xxii.

dalam hal kinerjanya. Para aktivis dan intelektual dan pereformasi orde baru diperintahkan untuk mengambil alih organisasi Sekber Golkar. Pada saat itu Golkar tidak dikembalikan ke basis aslinya di tahun 1957 sebagai bentuk baru perwakilan, tetapi diambil alih untuk kedua kalinya guna tujuan politik jangka pendek yang berbeda, yaitu memenangkan pemilihan umum bagi orde baru dan merestrukturisasi politik Indonesia.³

Pada tahun 1971 Golkar mendapatkan kemenangan besar pertamanya dalam pemilihan umum dan terus mendapatkan suara mayoritas besar bagi orde baru hingga tahun 1998. Kepemimpinan dan struktur organisasi yang baru ini, tetapi ada sejumlah unsur kunci gagasan-gagasan Golkar tahun 1957-1965 yang tetap berlanjut diantaranya adalah :⁴

“Masuknya para tokoh militer senior ke dalam institusi-institusi politik dan birokrasi sipil melalui penempatan para perwira melalui kekaryaan, kampanye partai-partai politik, bukannya ‘Penguburan’ seperti pada tahun 1957, tetapi penyederhanaan partai, yang tercapai pada tahun 1973, fusi organisasi masyarakat partai menjadi wadah tunggal tahun 1973-1978, menarik semua organisasi profesi ke dalam barisan Golkar, promosi secara agresif bagi konsep karyawan dalam semua perusahaan, sebagai dasar hubungan pemberi kerja-pekerja.”

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Golkar di orde baru diikuti dengan masuknya tokoh-tokoh militer sebagai aktor politik yang bergelut di politik partai Golkar dengan kekuasaan yang akan dilaluinya semasa berada di organisasi tersebut.

³ Ibid., hlm. xxii.

⁴ Ibid., hlm. xxiii.

Di orde baru masa dimana para toko berkuasa seperti SUAD V dan SUAD VI dari masa awal Golkar 1960 sampai 1990 tokoh seperti Harsudiono Hartas, Daryatmo, Sokowati, Kharus Suhud dan S. Subigjo SH memiliki karir dan kekuasaan dalam posisi Golkar selama bertahun-tahun.⁵

Tahun 1980 terjadi kebangkitan Supomo untuk menyaingi peran Soeharto dalam merumuskan Pancasila. Namun hal ini membawa kembali gagasan-gagasan Negara integralistik di belakang gagasan Golkar. Terbukti dari sebuah wawancara bersama Rachman Tolleng yang merupakan model orang-orang sipil yang dibawa ke dalam Golkar dalam orde baru pada akhir tahun 1960.⁶

Rachman Tolleng melaporkan atau memberi informasi mengenai partai Golkar saat itu adalah :⁷

“Orang orde baru membangkitkan konsep Negara integralistik yang dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945. Konsep ini membayangkan Negara sebagai sebuah struktur sosial integral, memasukan semua golongan dan semua anggota masyarakat, yang menghubungkan satu sama lain dalam sebuah masyarakat organik, terdapat sudut pandang yang memandang Negara sebagai institusi dominan dalam hubungannya dengan institusi masyarakat. Bentuk ekstrim pandangan ini adalah pendewaan negara karena masyarakat dianggap dilebur ke dalam dan diwakili oleh Negara”.

Berdasarkan paparan di atas, orde baru merupakan masa kebangkitan negara yang integralistik yang sesuai dengan konsep UUD 1945, sehingga memandang sebuah negara menjadi suatu institusi yang dominan dalam hubungan masyarakat.

⁵ Ibid., hlm. xxiii.

⁶ Ibid., hlm. xxiii.

⁷ Ibid., hlm. xxiv.

Basis teoritis sistem politik birokrasi seperti diturunkan dari konsep negara integralistik. Basis teoritis ini selanjutnya dikonsolidasikan dengan sebuah basis operasional dalam pendekatan teknokratis, yang mengasumsikan bahwa aspirasi penduduk dan pemenuhannya dan terutama pembangunan ekonomi dapat direncanakan secara fundamental serta dikelola secara ilmiah dan objektif.⁸

Supomo dan pemikirannya di tahun 1988 lebih dari 30 tahun konsep tersebut menghilang sepenuhnya, sementara gagasan dominasi Negara lebih menonjol pada pemerintahan partai politik Golkar di masa orde baru. Pada waktu yang sama gagasan ‘golongan’ dalam golongan karya telah menghilang. Munas Golkar IV Oktober 1988 memutuskan untuk mengubah nama organisasi menjadi GOLKAR, dalam huruf besar. Artinya Golkar bukan lagi singkatan namun melainkan nama sendiri.⁹

Pemikiran Golkar dalam Orde Baru termasuk unsur-unsur berikut ini:

“Paling utama, komitmen terhadap program pembangunan Orde Baru, dominasi aktivitas-aktivitas perpolitikan oleh Golkar, yang berfungsi sebagai sebuah negara satu partai, dengan dua partai lebih kecil sebagai saudara muda atau tambahan, Golkar sebagai jalan tengah antara nasionalisme dengan Islam, penolakan terhadap demokrasi parlementer gaya barat melalui demokrasi yang diklaim berdasarkan tradisi Indonesia, pendekatan pada keharmonisan dan keteraturan, yang dicapai melalui kekuatan jika diperlukan, penyederhadaan partai yang merupakan peran militer dalam posisi sipil melalui kekaryaan”.¹⁰

⁸ Ibid., hlm. xxiv.

⁹ Ibid., hlm. xxiv.

¹⁰ Ibid., hlm. xxv.

Ini merupakan campuran pemikiran atau gagasan pemikiran Golkar masa lalu terutama dengan tambahan utama ‘Pembangunan’ dan metode-metode kontrol politik Orde Baru. Walaupun banyak sekali polemik Golkar di era orde baru sampai reformasi, namun Golkar tetap berpegang teguh pada jalur yang benar bagi perkembangan manusia, budaya dan bangsa dan menganut asas “Tri-Kon” yang berarti kontinu, konvergen dan konsentris. Dapat diuraikan jika kontinu berarti dengan alamnya sendiri, konsentris berarti dengan alam diluarnya untuk menuju ke arah persatuan dan konsentris yang universal berarti bersatu di alam yang besar, namun tetap memiliki kepribadian sendiri. Dalam Pemilu 1971 Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Dasar-dasar partai Golkar di masa orde baru dibagi menjadi empat bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Di masa orde baru Golkar mampu menetapkan nasibnya di atas tangannya sendiri dengan asas berdikari dalam kehidupan politik;
2. Meletakkan dasar-dasar tentang hakikat golongan karya sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia;
3. Sendi-sendi keorganisasian yang disusun atas dasar demokratis dan solidaritas antar sesama karyawan;

4. Tujuan yang berupa ide politik yang hendak disapainya dengan organisasi itu dalam proses perjuangan politik selanjutnya.¹¹

Di orde baru golongan karya sudah berada pada masyarakat, jauh sebelum revolusi 17 Agustus 1945 yang berupa golongan karya kecil di waktu penjajahan Belanda, artinya Golkar merupakan partai politik yang sangat kuat di eranya yang sangat kuat dan mendominasi sampai saat ini masih ada keberadaan dan fungsinya sebagai partai politik.¹²

Negara Indonesia yang berfilsafat pancasila, bukan Negara Theokrasi juga bukan Negara Sekuler, tetapi Negara Potensial Religius. Dengan pengertian bahwa asas ketuhanan yang maha esa itu yang akan dapat memelihara dan mengembangkan keyakinan agama sebaik-baiknya. Asas dan ciri khusus parpol yang ada sejak di undang-undang No. 3 tahun 1945, tidak dapat diartikan sebagai asas atau ciri yang masih akan digunakan untuk memajukan susunan kenegaraan lain, tetapi pancasila adalah satu-satunya asas tunggal dalam kehidupan politik Indonesia. Mengingat bahwa UUD 1945 merupakan sistem pemerintahan presidensial, maka tidak ada urgensinya untuk menambah jumlah partai lagi dengan menghidupkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 adalah idealnya jika dikemudian hari dapat terwujud hanya ada satu GOLKAR dan satu Parpol, yang merupakan partai program, akan tetapi proses diarahkan pada kesadaran dan kebutuhan masyarakat Indonesia.¹³

¹¹ Imam Pratigny, *Ungkapan Sejarah Lahirnya Golongan Karya*, (Jakarta: Yayasan Bhakti T.P, 1984), hlm. 111.

¹² Ibid., hlm. 111.

¹³ Ibid., hlm. 120.

2.1.2 Rezim Reformasi

Pada tahun 1998 Golkar akan tersapu bersama Soeharto dan sebagian besar unsur orde baru lainnya. Pada kenyataannya, Golkar mampu bertahan dan muncul sebagai salah satu kekuatan politik terbesar dalam pemilihan umum Indonesia pada tahun 1999, 2004 dan 2009. Tetapi terdapat perubahan yang berbeda.¹⁴

Pada tahun 1957 Golkar diasumsikan akan menjadi alternatif bagi partai-partai, tetapi seperti telah dianalisa oleh Dirk Tomza secara berhati-hati, pada kenyataannya Golkar telah menjadi sebuah partai. Gagasan partai telah menang, mengalahkan gagasan anti partai. Alternatif bagi partai menjadi sebuah partai alternatif. Proses ini diawasi dengan tokoh Akbar Tandjung yang telah menulis catatan sendiri terhadap proses transisi ini. Namun sebagaimana yang dijelaskan saat ini sekarang terutama menjadi partai para pengusaha kaya yang terbukti dari peran Aburizal Bakrie sebagai ketuanya dan kemungkinan menjadi kandidat presiden. Dengan telah perginya sebagian tokoh-tokoh besar militer, sekelompok pengusaha di era reformasi mengambil alih kepemimpinan Golkar yang dipimpin oleh Shударmono.¹⁵

Nama Golkar tetap ada namun gagasan-gagasan lama sudah hampir menghilang. Gagasan Supomis tetap ada di pinggiran, dalam kepemimpinan Golkar lama yang dibentuk selama Demokrasi Terpimpin, yaitu Kosgoro, MKGR dan SOKSI. Gagasan-gagasan ini masih ada, namun ketika

¹⁴ David Reeve. *GOLKAR: Sejarah Yang...*, hlm. xxv.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. xxvi.

organisasi menjadi kuat dengan berjalannya waktu menjadi kekuatan politik otonom, gagasan-gagasan asli semakin lemah. Gagasan Golkar sebagai bentuk perwakilan berbeda sepenuhnya menghilang, tahun 1945 tahun setelah Soekarno meluncurkan sebuah konsep politik.¹⁶

Terdapat empat perkembangan utama selama 70 tahun masa kejayaan Golkar adalah :¹⁷

“Tahun 1940 sampai 1950 terdapat gagasan negara integralistik, tahun 1957 sampai 1965, organisasi-organisasi Golkar diusulkan oleh Soekarno, kemudian gagasan ini diambil alih oleh Angkatan Darat dan diubah menjadi senjata melawan PKI, tahun 1965 sampai 1998, Sekber Golkar diambil alih oleh kepemimpinan Orde Baru dan digunakan menjadi kendaraan elektoral, tahun 1998 sampai sekarang Golkar diubah menjadi sebuah partai, sebuah partai pengusaha.”

Berdasarkan paparan di atas, maka di masa orde baru merupakan gagasan yang diberikan oleh Soekarno yang kemudian gagasan tersebut diambil alih oleh kemilitieran yaitu angkatan darat yang akan dijadikan senjata untuk melawan PKI.

Dalam sistem politik demokratis, partai politik memiliki peranan yang penting terutama dalam rangka proses konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu ketika demokrasi berkembang ke seluruh pulau di dunia, pada tahun 1990 peran partai politik berkembang sangat pesat. Peran partai politik semakin nyata ketika demokrasi berkembang pesat.¹⁸

Kecenderungan merosotnya peranan partai politik tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, melainkan di negara Amerika latin, Afrika dan Asia pun sama mengalami penurunan peran partai politik, fenomena

¹⁶ Ibid., hlm. xxvi.

¹⁷ Ibid., hlm. xxvi.

¹⁸ Akbar Tanjung, *Golkar The Way*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), hlm. 2.

yang sama juga dapat dirasakan di Indonesia, khususnya di era masa transisi dari orde baru ke orde reformasi, tumbanganya orde baru ditanggapi dengan munculnya partai-partai baru, hal tersebut sudah sewajarnya terjadi karena di masa orde baru partai politik dibatasi dan pada masa transisi pemerintahan. Sejak itu juga, kehidupan politik Indonesia benar-benar hiruk-pikuk oleh berbagai aktivitas politik dengan segala atributnya.¹⁹

Setelah pemilu 1999 kesenangan kebebasan politik mulai mengalami titik balik, terutama setelah masyarakat merasakan terjadinya kesenjangan antara harapan mereka dan lemahnya kinerja partai politik, baik di parlemen maupun pemerintahan. Partai politik dan politikusnya banyak sekali kasus yang tidak keberpihakan kepada rakyat. Partai politik seringkali tidak sejalan dengan keberpihakannya dengan rakyat. Di era reformasi saat itu partai politik tampak gagal memberi pedoman kepada rakyat dan banyak sekali kasus pada pemilihan pemimpinnya seperti presiden, gubernur, walikota dan anggota legislatif pusat dan daerah.²⁰

Era reformasi memang membawa perubahan politik sangat mendasar. Perubahan UUD 1945 dilakukan agar partai politik dapat sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Masalahnya, perubahan politik dan pembentukan kelembagaan baru tidak mudah disepakati oleh kekuatan politik yang ada. Padahal dalam sistem politik demokratis partai politik harus secara cepat merespon berbagai perubahan.²¹

¹⁹ Ibid., hlm. 2.

²⁰ Ibid., hlm. 5.

²¹ Ibid., hlm. 6.

Partai Golkar merupakan kekuatan politik pendukung rezim orde baru, yang ditumbangkan oleh gerakan reformasi. Namun kekuatan politik ini mampu bertahan sampai di era reformasi. Padahal, yang lazimnya terjadi di negara yang mengalami transisi partai politik lama akan lenyap bersama ordenya, namun tidak begitu demikian. Walaupun banyak citra negatif, Golkar masih mampu hidup di era transisi tersebut.²²

2.1.3 Partai Politik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menugaskan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (Pasal 22E ayat (3)) dan yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Pasal 6). Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah juga menugaskan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan posisinya sebagai peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, partai politiklah yang menentukan siapa yang menjadi calon anggota DPR dan DPRD dan mengarahkan para kadernya di DPR dan DPRD dalam membuat keputusan tentang legislasi, anggaran, dan pengawasan.²³

Partai politik pula yang mendengarkan, menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat” atau melaksanakan fungsi representasi politik. Dengan serangkaian kewenangan yang dimilikinya, partai politik menentukan siapa yang menjadi penyelenggara negara, baik di lembaga

²² Ibid., hlm. 6.

²³ Ramlan Subakti. *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013), hlm. 1.

legislatif maupun eksekutif tingkat nasional maupun daerah. Itulah sebabnya mengapa partai politik peserta Pemilu digambarkan sebagai ‘pintu masuk untuk jabatan politik.’²⁴

Partai politik merupakan komponen dan aktor utama sistem politik demokrasi baik, sebagai peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan yang mengusulkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maupun sebagai “jembatan” antara rakyat dengan negara. Partai politik disebut sebagai jembatan antara rakyat dengan Negara karena partai politik melaksanakan peran sebagai representasi politik rakyat dalam menyuarakan aspirasi dan kehendak rakyat dan memperjuangkannya menjadi bagian dari kebijakan publik.²⁵

Leon O. Epstein, mendefinisikan partai politik sebagai satu kelompok pengejar kedudukan pemerintahan yang secara bersama terikat pada identitas atau label yang dimilikinya. sedangkan sigmund Neumann, menyatakan partai politik adalah organisasi artikuratif yang terdiri dari pelaku-peraku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.²⁶

²⁴ Ibid., hlm. 1.

²⁵ Ibid., hlm. 2.

²⁶ Cholisin dan Nasiwan, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 111.

Partai politik jika dilihat dari asar-usurnya, paring tidak dapat dijelaskan melalui tiga teori yaitu:²⁷

1. Teori Kelembagaan. Teori ini, melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kalangan anggota parlemen (yang diangkat) karena kebutuhan untuk membina dukungan dari masyarakat' maka dibentuklah partai Buruh di Inggris dan Australia.
2. Teori Situasi Historis' Teori ini' menjelaskan timbulnya partai karena situasi perubahan dari masyarakat tradisional (strukturnya sederhana) ke masyarakat modern (strukturnya lebih kompleks) Perubahan itu menimbulkan tiga krisis' yaitu legitimasi, integrasi dan partisipasi Untuk mengatasi ketiga partai politik krisis tersebut, maka dibentuklah Teori pembangunan' melihat timbulnya.
3. Teori Pembangunan partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi' sosial ekonomi, melahirkan berbagai peningkatan.

Modernisasi dalam kehidupan misalnya pendidikan dan industrialisasi. Uraian mengenai fungsi-fungsi partai politik sebagai berikut.²⁸

1. Sosialisasi Politik. Sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik. Nilai-nilai politik yang disosialisasikan adalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan metode penyampaiannya dapat dilakukan dengan pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

²⁷ Ibid., hlm. 111.

²⁸ Ibid., hlm. 113.

2. Rekrutmen Politik. Rekrutmen politik yakni seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
3. Partisipasi Politik. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.
4. Artikulasi Kepentingan. Artikulasi kepentingan merupakan kegiatan partai politik untuk membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah. Misalnya, partai bertemu atau mengundang berbagai kelompok kepentingan untuk menyatakan tuntutan dan keinginan mereka berkaitan dengan suatu kebijakan publik.

2.1.4 Sejarah Partai Golkar

Gagasan partai Golkar sudah ada sejak tahun 1940, organisasi tersebut adalah berbagai bentuk golongan fungsional atau golongan karya yang populer disingkat Golkar. Golkar mulai diorganisasikan sejak akhir dekade 1950 untuk memberi bentuk terhadap gagasan kolektivis dalam perpolitikan Indonesia. Pada tahun 1957 gagasan Golkar merupakan alternatif terhadap partai-partai politik yang terpinggirkan.²⁹

Banyak sekali kasus di masa lahirnya Golkar, semisalnya pada saat gagasan sangat kuat, maka organisasi sedang lemah begitu pula sebaliknya. Pada pertengahan tahun 1940 dan akhir 1950 gagasan Golkar sangat kuat

²⁹ David Reeve. *GOLKAR: Sejarah Yang...*, hlm. xiii.

tetapi organisasinya memiliki bentuk paling lemah. Ketika organisasi menjadi kuat, gagasan melemah dan sampai sekarang abad ke 21 hal tersebut hampir hilang. Organisasi Golkar telah diambil alih dan diubah ke arah tujuan yang berbeda pada tahap yang terpisah.³⁰

Adapun tahapan tersebut dibagi menjadi tiga bagian, tahapan pertama di tahun 1957-1965 organisasi Golkar berubah melawan semua partai menjadi rival politik bagi sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Indonesia, pada tahap kedua di tahun 1968-1998 organisasi Golkar digunakan untuk menjadi kendaraan elektoral bagi militer dan orde baru. Pada tahap ketiga tahun 1998 hingga sekarang Golkar sendiri ironisnya berubah menjadi partai dan diambil alih oleh para pengusaha. Gagasan-gagasan asli telah didorong ke pinggiran.³¹

Undang-undang dasar telah menyebutkan bahwa badan tertinggi kehendak rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR dibentuk oleh perwakilan dari daerah-daerah dan ‘golongan-golongan’. Banyak rujukan terhadap penyebutan golongan dalam sejarah Golkar selanjutnya. Supomo mengatakan “Badan-badan seperti koperasi-koperasi, himpunan-himpunan pekerja dan badan-badan kolektif lainnya menjadi gagasan golongan fungsional sejak tahun 1957”.³²

Prinsip-prinsip pemikiran Golkar pada sekitar masa ini dapat dirangkum sebagai berikut:³³

³⁰ Ibid., hlm. xiii.

³¹ Ibid., hlm. xiii.

³² Ibid., hlm. xv.

³³ Ibid., hlm. vi.

1. Prinsip melibatkan kedudukan tertinggi dan superioritas moral bangsa atau negara;
2. Individu tidak lebih utama dari pada negara tetapi dimana masyarakat membuat dirinya sendiri spesifik;
3. Fungsi individu-individu dalam golongan-golongan dan golongan dalam bangsa; makna mereka dan kesejahteraan mereka muncul dari fungsi mereka dalam totalitas;
4. Hak-hak adalah hak-hak sosial yang berasal dari fungsi individu tertentu di dalam golongan-golongan dan dalam masyarakat;
5. Tugas individu dalam masyarakat dipandang sebagai suatu kewajiban suci dan pelayanan penuh pengabdian;
6. Nilai-nilai mendasar keseluruhan sistem adalah keharmonisan, keteraturan dan ketentraman, kesatuan dan totalitas;
7. Kebutuhan untuk mempertahankan nilai-nilai absolut ini membutuhkan pemerintahan kuat;
8. Pencapaian keharmonisan berarti pencapaian penyatuan dengan kodrat alam, yang juga dinyatakan sebagai penyatuan kawula atau orang yang mengabdikan dan anggota yang memiliki tanggung jawab bersama.

Golkar di tahun 1957 sampai 1965 merupakan sebagai alternatif partai-partai. Setelah pemilihan umum tahun 1955 terjadi perubahan oleh presiden Soekarno yang mempersempit lingkup partai di Indonesia terutama sistem partai politik gaya barat.³⁴

³⁴ Ibid., hlm. xviii.

Soekarno saat itu banyak sekali melakukan kunjungan ke luar negeri, disana Oekarno melakukan kursus politik dengan hasil ‘Mengubur partai politik’. Namun di sisi lain beliau mengusulkan agar semua partai diganti oleh Golkar. Soekarno merupakan seorang politisi dan pemikir politik yang meluncurkan gagasan Golkar ke dalam perpolitikan Indonesia pada tahun 1956-1957. Golkar merupakan gagasan Soekarno, maka dari itu Soekarno menjadi aktor politik Golkar yang paling disegani.³⁵

Tahun 1950 Supomo menganjurkan untuk melakukan demokrasi terpimpin yang menunjukkan bahwa seorang petani bisa menjadi seorang nasionalis, komunis atau muslim dengan dibagi oleh ideologi negara, tetapi apa yang sama-sama mereka miliki adalah kesamaan identitas sebagai seorang petani. Sistem pepolitikan harus dibangun di atas apa yang sama-sama dimiliki oleh rakyat dan bukan apa yang menjauhkan mereka.³⁶

Sejak tahun 1957 hingga terjadi hubungan kerjasama antara presiden Soekarno dengan angkatan darat untuk mengatasi pemberontakan daerah dan mengubah sistem perpolitikan. Namun pada akhir 1959, ketika demokrasi terpimpin akhirnya dimulai secara resmi, angkatan darat lebih dulu membentuk organisasi Golkar, sedangkan presiden Soekarno belum membentuk satupun, maka dari itu angkatan darat mengambil alih gagasan Golkar.³⁷

Pada tahun 1960 antara presiden dengan kepemimpinan angkatan darat semakin sedikit memiliki kesamaan kepentingan. Angkatan darat ingin

³⁵ Ibid., hlm. xix.

³⁶ Ibid., hlm. xix.

³⁷ Ibid., hlm. xx.

melarang PKI sepenuhnya, tetapi juga tetap menjaga keberadaan gagasan melarang semua partai politik. Sejak tahun 1957, Soekarno tidak mampu membangun apa pun untuk dirinya sendiri dari organisasi Golkar. Konsep utama sejak tahun 1960 hingga 1965 konsep baru berbasis partai menandai berakhirnya antusiasme awal Soekarno yang bimbang ke arah partai harus dipelajari mengenai tentang kehidupan.³⁸

Proses utama yang terlihat sejak 1957 hingga 1965 adalah perubahan dalam gagasan Golkar sebagai bentuk baru perwakilan yang diluncurkan oleh Soekarno menjadi sebuah senjata anti PKI yang digunakan oleh Angkatan Darat dan para sekutunya.³⁹

2.1.5 Teori Pelembagaan Oleh Randal

Partai politik merupakan sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan.⁴⁰

Partai politik di era reformasi melahirkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, adanya persoalan yang paling mendasar yang membawa partai politik pada ruang lingkup perpecahan sehingga secara kelambagaan tidak berfungsi dengan baik ada tiga masalah yang harus dipecahkan yaitu, Ideologi dan platform, kohesifitas dan pengelolaan

³⁸ Ibid., hlm. xxi.

³⁹ Ibid., hlm. xxii.

⁴⁰ Richad S Katz, Handbook Partai Politik, (Jakarta: LPIP, 2015), hlm. 3.

konflik, rekrutmen politik dan pembentukan kader. Kajian tentang pelebagaan partai adalah sebuah kajian yang dilakukan oleh Randall dan Svasand. Mereka berpendapat bahwa pelebagaan seharusnya di pahami sebagai proses dimana partai menjadi mapan dalam pola perilaku, terdapat beberapa unsur pelebagaan partai menurut Randall dibagi menjadi empat bagian yang harus diperhatikan bagian, kesisteman, nilai otonomi, *Value infusion* dan *Reification*.⁴¹

Tabel 2
Dimensi Pelebagaan Partai

	Internal	Eksternal
<i>Structural</i>	<i>Systemness</i>	<i>Decisional Autonomy</i>
<i>Attitudinal</i>	<i>Value Infusion</i>	<i>Reification</i>

Sumber : Randall dan Svasand, 2002

Di bawah ini merupakan penjelasan dimensi pelebagaan partai politik menurut Randall dan Svasand:

1. *Systemness*

Adalah suatu proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk dalam penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik.

Diantara karakteristik partai yang harus diperhatikan, Teori Randall dan Svasand menyarankan batasan *systemness* adalah sebagai berikut:

⁴¹ Vicky Randall dan Lars Svasand. *Party Institutionalization In New Democracies*. (Sage Publications, 2002), hlm. 12.

“The way party originated and grew, its relevant resources and especially funding, the role of individual party leader vs. the party organization as such, the role of factions versus the party as a whole and the implications of the clientilism”. (Derajat *systemness* sebuah partai dapat diukur dengan memperhatikan beberapa aspek, yakni *scope* pengorganisasian, untuk melihat sejauhmana jangkauan sebuah partai terhadap akar rumput).

Aspek lainnya untuk mengukur derajat *systemness* adalah dengan melihat pada aspek rutinisasi konstitusi partai. Serta aspek yang terakhir pelembagaan partai modern menurut Randall bisa diukur dari kemampuan partai untuk mengelola tiga elemen utama yang menentukan eksistensinya adalah:

“Pelembagaan SDM Partai mencakup pentingnya isu rekrutmen, kaderisasi dan kejelasan sistem karir dalam segenap kekhasan organisasi partai politik. Pelembagaan Manajemen Keuangan Partai mulai dari sumber-sumber keuangan yang jelas, pengelolaan yang melembaga, transparan dan terbuka dan partai yang bisa dipertanggungjawabkan. Pelembagaan Manajemen Organisasi”

2. *Value Infusion*

Value Infusion atau identitas nilai partai politik didasarkan atas ideologi atau platform partai, basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan partai. Menurut Randall Identitas nilai partai berhubungan dengan beberapa hal, diantaranya:

“Hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular base*), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, ataupun kelompok - kelompok tertentu. Kedua, pengaruh clientilism dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota bersifat instrumental, atau lebih bersifat ideologis yang anggotanya mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap partai”.

3. *Decisional autonomy*

Dimensi otonomi keputusan suatu partai politik berhubungan dengan ketergantungan terhadap aktor luar atau dengan kata lain dimensi ini terkait dengan hubungan antara partai dengan aktor luar partai baik dengan sumber otoritas tertentu, maupun dengan sumber dana dan sumber dukungan massa. Implikasi dari adanya aktor luar, Panebianco (dikutip oleh Randall dan Svasand) menyebutkan bahwa:

“Kehadiran aktor luar atau *sponsorship* cenderung akan melemahkan kelembagaan “*the presence of a sponsoring institution will tend to result in weak institutionalization, since the leadership’s source of legitimacy and the project of party organizational loyalties will be outside the party, vested in this external institutions*”.

4. *Reification*

Reifikasi adalah seberapa besar partai mampu memberikan citra ke publik yang mampu mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya. Selain itu juga berkaitan dengan bagaimana partai mampu menjelmakan institusinya sebagai institusi yang memiliki nilai positif dan membawa dampak positif dalam mendapatkan pilihan konstituen sebanyak-banyaknya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menambah ketajaman dalam penelitian ini, penulis perlu untuk menjadikan penelitian terdahulu sebagai referensi dalam upaya mencapai tujuan penelitian secara baik. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lili Romli (2011) dengan

penelitian berjudul “Reformasi partai politik di Indonesia”. Dengan hasil penelitian Pada era reformasi ini, partai politik menghadapi persoalan terkait dengan pelebagaan partai. Umumnya, partai-partai politik menghadapi persoalan pelebagaan partai yang belum kuat, yaitu masalah ideologi dan platform, kohesivitas dan manajemen konflik, serta rekrutmen dan kaderisasi.⁴²

Selanjutnya penelitian oleh Teguh Imansyah (2012) dengan penelitian berjudul “Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelebagaan Partai”. Dengan hasil penelitian Regulasi partai yang belum berpengaruh pada penguatan pelebagaan, lemahnya pelebagaan disebabkan karena sistem internal modern.⁴³

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridha (2016) dengan penelitian berjudul “Dilema Pelebagaan Partai Golongan Karya (Golkar) Di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan”. Dengan hasil penelitian Politik klan dapat muncul dalam proses demokrasi internal partai Golkar akibat dari, pertama, demokrasi di Indonesia yang membutuhkan biaya sangat mahal yang membuat partai membutuhkan dukungan finansial yang mumpuni dengan memanfaatkan kader-kader di daerah yang tergolong kepada local strongman yang memiliki akses kepada modal ekonomi dan juga modal sosial. Kedua, adanya ketidaksiapan publik menghadapiperubahan yang dibawa oleh demokratisasi, ketika mereka sudah terbiasa selama 32 tahun

⁴² Lilik Romli. 2012. *Reformasi partai politik di Indonesia*. Malang: Jurnal Politica. Vol. 2, No. 2, November 2011.

⁴³ Teguh Imansyah. 2012. *Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelebagaan Partai Politik*. Jakarta: Jurnal Recth Vinding, Vol. 1, No. 3.

berada dalam baying-bayang rezim otoriter Orde Baru untuk memilih seseorang dalam pemilu berdasarkan hubungan patron-klien.⁴⁴

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Asep Nurjaman (2018) dengan penelitian berjudul “Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru”. Dengan hasil penelitian Sejak kelahirannya, Golkar merupakan partai yang diusung oleh berbagai kelompok fungsional dengan tujuan membangun kekuatan politik untuk menadingi PKI. Sejak terjadinya reformasi, Golkar banyak ditinggalkan oleh banyak kelompok pendukungnya yang membentuk faksionalisme. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perubahan faksionalisme di internal Golkar pasca Orde Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Golkar pasca Orde Baru banyak mengalami perubahan faksionalisme; faksionalisme yang terjadi pada masa Orde Baru bersumber dari kelompok fungsional, sementara setelah reformasi menjadi faksionalisme berbasis personalisme.⁴⁵

Tabel 3
Matriks Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penelitian	Peneliti Terdahulu	
		Perbedaan	Persamaan
1	Reformasi partai politik di Indonesia (Lilik Romli, 2012)	Perubahan dalam penerapan sistem politik, dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis	Menjelaskan partai politik di era reformasi
2	Regulasi Partai dalam mewujudkan	Indonesia memilih sistem demokrasi untuk melahirkan pelembagaan partai politik	Regulasi kepartaian yang ada belum berpengaruh pada penguatan pelembagaan partai

⁴⁴ Muhammad Ridha. 2016. *Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) Di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan*. Jurnal Ilmu Pemerintah. Vol. 2, No. 1. ISSN 2442-5958.

⁴⁵ Asep Nurjaman. 2018. *Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru*. Malang: Jurnal Sospol, Vol 4 No 2 (Juli – Desember 2018), Hlm 34-48.

	penguatan dan peran dan fungsi pelebagaan partai politik (Teguh Imansyah, 2012)	yang kuat khususnya partai Golkar	politik, lemahnya pelebagaan disebabkan karena sistem internal modern
3	Dilema Pelebagaan Partai Golongan Karya (Golkar) Di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan (Muhammad Ridha, 2016)	Demokratisasi merupakan gerakan mainstream yang tengah melanda hampir semua Negara di dunia. Demokratisasi diartikan sebagai sebuah proses yang dilalui oleh sebuah Negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang otoriter atau oligarkis, menuju pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih layak	Politik klan dapat muncul dalam proses demokrasi internal partai Golkar akibat dari, pertama, demokrasi di Indonesia yang membutuhkan biaya sangat mahal yang membuat partai membutuhkan dukungan finansial yang mumpuni dengan memanfaatkan kader-kader di daerah yang tergolong kepada local strongman yang memiliki akses kepada modal ekonomi dan juga modal sosial. Kedua, adanya ketidaksiapan publik menghadapi perubahan yang dibawa oleh demokratisasi, ketika mereka sudah terbiasa selama 32 tahun berada dalam baying-bayung rezim otoriter Orde Baru untuk memilih seseorang dalam pemilu berdasarkan hubungan patron-klien
4	Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru (Asep Nurjaman, 2018)	Sarana artikulasi kepentingan menjadi ruang yang subur bagi tumbuhnya persaingan kelompok maupun elit dalam rangka memenangkan pengaruh dan posisi penting dalam partai.	Pertama, menemukan pola faksionalisme baru di dalam tubuh Partai Golkar pasca Orde Baru. Kedua, menemukan pola kompetisi antar faksi di dalam tubuh organisasi Politik Golkar. Ketiga menemukan faktor-faktor yang memberi kontribusi pada peningkatan tensi konflik antar faksi di dalam tubuh partai politik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Partai politik pada hakikatnya adalah sebuah suprastruktur yang harus dimiliki sebuah sistem pemerintahan agar dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang demokratis. Partai politik sangat erat sekali kaitannya

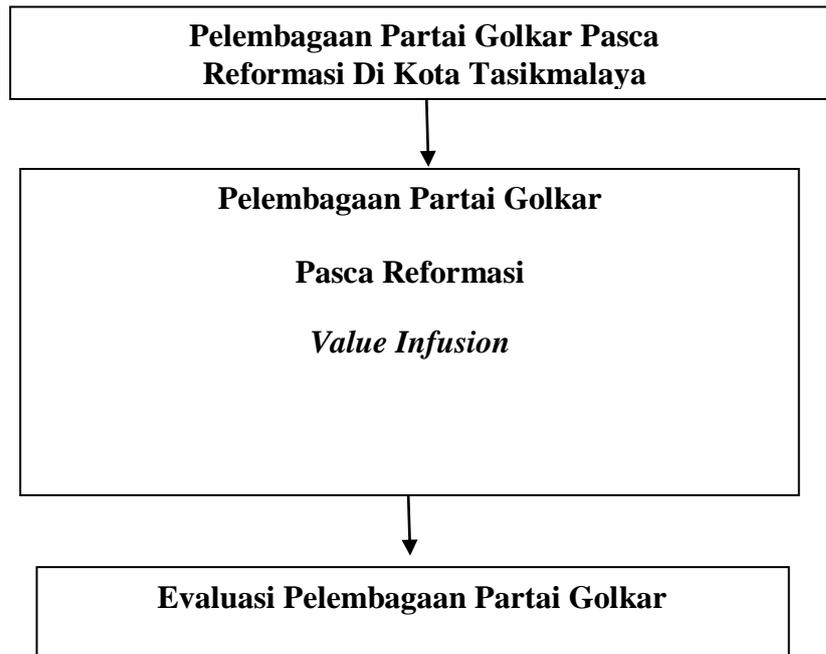
dengan demokrasi Partai politik harus menjamin agar para kader partai pada semua tingkatan organisasi aktif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan partai.

Partai Golkar merupakan kekuatan politik pendukung rezim orde baru, yang ditumbangkan oleh gerakan reformasi. Namun kekuatan politik ini mampu bertahan sampai di era reformasi. Padahal, yang lazimnya terjadi di negara yang mengalami transisi partai politik lama akan lenyap bersama ordenya, namun tidak begitu demikian. Walaupun banyak citra negatif, Golkar masih mampu hidup di era transisi tersebut. Kajian tentang pelebagaan partai adalah sebuah kajian yang dilakukan oleh Randall dan Svasand. Mereka berpendapat bahwa pelebagaan seharusnya di pahami sebagai proses dimana partai menjadi mapan dalam pola perilaku, didasarkan dari pemahaman ini keduanya telah meletakkan empat unsur atau dimensi untuk mengetahui pelebagaan partai yaitu, kesisteman, influsi nilai, otonomi, dalam pengambilan keputusan, dan reifikasi. Demokratisasi partai secara internal mencakup hak anggota partai (partisipasi), keterwakilan berbagai unsur dalam partai (representasi dan inklusif), pemilihan pengurus partai tingkat pusat (pemilihan), pelebagaan prinsip dan prosedur demokrasi dalam pengelolaan partai, demokratisasi sumber keuangan partai, transparansi dan akuntabilitas partai, hubungan partai dengan fraksi partai di lembaga legislatif, otonomi pengurus partai tingkat lokal, kewenangan pengurus cabang pada pemilu lokal dan peran partai tingkat pusat dalam pemilu nasional.

Proses demokrasi internal partai adalah proses pemilihan seorang calon pimpinan Partai melalui penyerapan aspirasi seluruh kader-kader di tingkat akar sehingga Ketua Umum yang terpilih merupakan aspirasi kader-kadernya.

Sedangkan dimensi penerapan prinsip dan prosedur demokrasi dalam pengelolaan partai secara internal dapat dioperasionalkan menjadi sejumlah indikator siapa yang berwenang memilih dan mengganti pengurus partai, menghormati dan mengakomodasi perbedaan dalam partai, kemungkinan menyatakan kritik secara terbuka terhadap kebijakan partai, kemungkinan anggota fraksi partai mengambil keputusan yang berbeda dari garis partai, tetapi keputusan itu berdasarkan tuntutan konstituen, keterwakilan berbagai unsur partai (daerah, kelompok marjinal, dan kelompok minoritas), baik dalam kepengurusan partai maupun pencalonan jabatan publik, pengelolaan partai menurut kehendak elite partai atau berdasarkan AD/ART partai, demokratisasi sumber keuangan partai politik sehingga partai tidak tergantung kepada satu pihak dalam sumber keuangan, keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan partai dan penerimaan dan pengeluaran keuangan partai.

Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan pada kerangka pemikiran di bawah ini:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran